

## **BAB III**

### **KEGAGALAN RESEP BANK DUNIA DAN IMF DALAM MENGATASI KRISIS EKONOMI INDONESIA**

Pada Bab ini penulis akan membahas tentang banyaknya kegagalan resep yang telah dipakai oleh Indonesia dalam menangani krisis ekonominya, sehingga Indonesia membutuhkan resep lain dalam menanggulangi dampak krisis yang berkepanjangan. Dalam penanganan krisis ekonomi Indonesia, pemerintah sudah melakukan berbagai cara untuk menanggulangi Krisis yang melanda Indonesia. Yang antara lain adalah melakukan pinjaman atau hutang luar negeri ke pihak-pihak penyedia hutang. Adapun peminjaman hutang tersebut tidak selalu berjalan mulus dan sesuai rencana. Banyak kendala yang dihadapi dalam upaya pinjaman hutang luar negeri dan penyelesaian krisis ekonomi Indonesia. Ada beberapa pihak yang ikut andil bagi pemulihan krisis ekonomi Indonesia.

#### **A. Bentuk Resep Bank Dunia dan IMF (*International Monetary Fund*)**

Kondisi perekonomian dalam negeri yang semakin parah membuat pemerintah kala itu harus mengambil tindakan yang cepat demi penyelamatan perekonomian dalam negeri. Sehingga diputuskanlah untuk melakukan pinjaman utang luar negeri. Sebelum membahas lebih lanjut tentang Bank Dunia dan IMF

ada perbedaan yang perlu diperhatikan atas dua lembaga keuangan internasional

Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah apakah ada perbedaan antara IMF dan Bank Dunia? <sup>28</sup> Karena dua lembaga keuangan internasional tersebut terkesan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Sebenarnya ada perbedaan antara Bank Dunia dan IMF. Secara tradisional tugas IMF adalah membantu negara yang bersangkutan, artinya yang mencari intervensinya, untuk mendapatkan kembali keseimbangan neracanya dengan dunia luar. Yang dipentingkan akhirnya adalah keseimbangan neraca berjalannya.

Bank Dunia lebih banyak mengurus masalah-masalah struktural. Ia membantu negara yang bersangkutan dalam perombakan beberapa sektor dan menyempurnakan kebijakan yang menyangkut berbagai sektor yang sangat penting, misalnya sektor industri dan perdagangan. Biasanya yang dituju adalah liberalisasi atau deregulasi sektor-sektor ini, atau dengan kata-kata lain, menyingkirkan hambatan-hambatan yang merintang produktivitasnya.

Mengapa kedua instansi bisa memberikan bantuan yang serupa? Ini karena perkembangan sejarah, dan terkait dengan besar dana bantuan yang disediakan oleh IMF atau Bank Dunia itu. Yang menyediakan dana bantuan terbesar juga mempunyai pengaruh terbesar. Di Indonesia misalnya, IMF-lah yang akan bertanggung jawab atas program umum stabilisasi serta mencari pola makro-policy baru yang lebih sehat. Dana bantuan dari IMF lebih besar daripada yang disediakan Bank Dunia. Bank Dunia di Indonesia akan lebih bertanggungjawab

---

<sup>28</sup> *Mengenal IMF dan Bank Dunia*, (diunduh pada 14 Juli 2010); dari

<http://www.pacific.net.id/lekor/godli/1207/011207.html>

atas perbaikan struktural sektoral, khususnya sektor perbankan. Tetapi, IMF pun akan ikut bicara dalam hal ini. Bank Dunia akan membantu mengembangkan sistem pengendalian sektor perbankan di Indonesia agar ekonomi tidak mudah digoncangkan oleh bank bobrok, kredit macet serta proyek-proyek jelek, seperti sekarang ini. Tetapi IMF juga akan ikut bicara. Di antara lembaga-lembaga keuangan internasional ini akan ada semacam pembagian kerja: Bank Dunia akan mengurus pembenahan bank-bank komersial pemerintah, IMF mengurus penyehatan bank-bank swasta dan Bank Pembangunan Asia akan membenahi bank-bank pembangunan daerah.

Ideologi atau keyakinan tradisional IMF adalah bahwa prioritas yang paling utama yang harus dijunjung tinggi adalah stabilisasi moneter. Artinya, Indonesia harus mencapai kembali suatu kestabilan moneter dengan inflasi yang rendah dan defisit neraca berjalan yang juga kecil (angka sasarannya 2% dari PDB) agar "sustainable" untuk masa yang lama.

Bank Dunia lebih cenderung mementingkan kepentingan stimulasi produksi dan ekspor. Di belakang IMF dan Bank Dunia ada pandangan negara-negara pemegang saham yang besar, seperti Amerika Serikat dan Jepang.

### **1. Resep Bank Dunia**

*International Bank for Reconstruction and Development* (IBRD, dalam bahasa-bahasa Roman: *BIRD*) atau Bank Internasional untuk Pembangunan Kembali dan Perkembangan, lebih dikenal sebagai Bank Dunia, adalah sebuah organisasi internasional yang didirikan untuk melawan kemiskinan dengan cara

membantu membiayai negara-negara. Pengoperasian Bank Dunia dijaga melalui pembayaran sebagaimana diatur oleh negara-negara anggota.<sup>29</sup>

Aktivitas Bank Dunia saat ini difokuskan pada negara-negara berkembang, dalam bidang seperti pendidikan, pertanian dan industri. Bank Dunia memberi pinjaman dengan tarif preferensial kepada negara-negara anggota yang sedang dalam kesusahan. Sebagai balasannya, pihak Bank juga meminta bahwa langkah-langkah ekonomi perlu ditempuh agar misalnya, tindak korupsi dapat dibatasi atau demokrasi dikembangkan.

Bank Dunia didirikan pada 27 Desember 1945 setelah ratifikasi internasional mengenai perjanjian yang dicapai pada konferensi yang berlangsung pada 1 Juli–22 Juli 1944 di kota Bretton Woods. Markas Bank Dunia berada di Washington, DC, Amerika Serikat. Secara teknis dan struktural Bank Dunia termasuk salah satu dari badan PBB, namun secara operasional sangat berbeda dari badan-badan PBB lainnya.

Meski sering menjadi harapan negara miskin sebagai sumber pinjaman dana pembangunan, Bank Dunia sering dikritik oleh para penentang "neokolonial" korporasi globalisasi. Para penentang ini, yang sering disebut sebagai anti-globalisasi, menyalahkan Bank Dunia karena melemahkan kedaulatan negara penerima pinjaman melalui liberalisasi ekonomi. Kritik yang paling umum adalah Bank Dunia berada dalam pengaruh negara-negara tertentu (terutama Amerika Serikat), yang mendapat manfaat paling banyak dari aktivitas Bank Dunia.

---

<sup>29</sup> Bank Dunia (2013). "Bank Dunia". <http://www.worldbank.org/indonesia/indonesia/Bank-Dunia>

Basis keuangan Bank Dunia adalah modal yang diinvestasikan oleh negara anggota bank ini yang berjumlah 186 negara. Lima pemegang saham terbesar di Bank Dunia adalah AS, Perancis, Jerman, Inggris, dan Jepang. Kelima negara itu berhak menempatkan masing-masing satu Direktur Eksekutif dan merekalah yang akan memilih Presiden Bank Dunia. Secara tradisi, Presiden Bank Dunia adalah orang AS karena AS adalah pemegang saham terbesar. Sementara itu, 181 negara lain diwakili oleh 19 Direktur Eksekutif (satu Direktur Eksekutif akan menjadi wakil dari beberapa negara).<sup>30</sup>

Ada resep yang sama yang diberikan Bank Dunia untuk Indonesia dalam masalah defisit transaksi berjalan, semakin bertambahnya utang luar negeri (Swasta dan Pemerintah), Banyaknya kelemahan dalam sistem perbankan Indonesia, dan instabilitas sosial politik. Kebijakan yang diterapkan Bank Dunia yang mempengaruhi kebijakan politik dan ekonomi suatu negara, disebut SAP (*Structural Adjustment Program*). Bila negara-negara ingin meminta tambahan hutang, Bank Dunia memerintahkan agar negara penerima hutang melakukan “perubahan kebijakan” (yang diatur dalam SAP). Bila negara tersebut gagal menerapkan SAP, Bank Dunia akan memberi sanksi fiskal. Perubahan kebijakan yang diatur dalam SAP antara lain, program pasar bebas, privatisasi, dan deregulasi.<sup>31</sup>

Bank Dunia telah aktif di Indonesia sejak 1967. Sejak saat itu hingga saat ini, Bank Dunia telah membiayai lebih dari 280 proyek dan program pembangunan senilai 26,2 milyar dollar atau setara dengan Rp243,725 triliun

---

<sup>30</sup> Peran Bank Dunia dalam Kemunduran Perekonomian Indonesia, (diunduh pada 6 Mei 2010);

(dengan kurs Rp9.302 per USD). Menurut Managing Director The World Bank Group, Ngozi Okonjo (30/1/2008), pinjaman tersebut telah digunakan pemerintah Indonesia untuk mendukung pengembangan energi, industri, dan pertanian. Sementara yang sektor yang paling mendominasi selama 20 tahun pertama yakni infrastruktur yang pemberiannya kepada masyarakat miskin. Total hutang Indonesia kepada Bank Dunia adalah 243,7 Trilyun rupiah dan total hutang pemerintah Indonesia kepada berbagai pihak mencapai 1600 Trilyun rupiah.<sup>32</sup>

Anggoro (2008) menulis, ada beberapa tugas Bank Dunia di Indonesia. Pertama, memimpin Forum CGI. Anggota CGI (Consultative Group meeting on Indonesia) adalah 33 negara dan lembaga-lembaga donor yang dikoordinasikan oleh Bank Dunia. CGI “membantu” pembangunan di Indonesia dengan cara memberikan pinjaman uang serta bantuan teknik untuk menciptakan aturan-aturan pasar dan aktivitas ekonomi liberal. Dalam hal ini, Bank Dunia bertugas menciptakan pasar yang kuat bagi kepentingan negara-negara dan lembaga donor. Tugas kedua Bank Dunia adalah menyediakan hutang dalam jumlah besar, bekerjasama dengan Jepang dan ADB (Asian Development Bank). Tugas Bank Dunia yang lain adalah mendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan privatisasi dan kebijakan yang memihak pada perusahaan-perusahaan besar.

a. Hutang Proyek

Hutang proyek adalah hutang dalam bentuk fasilitas berbelanja barang dan jasa secara kredit. Namun, sayangnya, hutang ini justru menjadi alat bagi Bank Dunia untuk memasarkan barang dan jasa dari negara-negara pemegang saham utama, seperti Amerika, Inggris, Jepang dan lainnya kepada Indonesia.

b. Hutang Dana Segar

Hutang dana segar bisa dicairkan bila Indonesia menerima Program Penyesuaian Struktural (SAP).

**2. Bentuk Resep IMF<sup>33</sup>**

IMF (*International Monetary Fund*) adalah organisasi internasional yang bertanggungjawab dalam mengatur sistem finansial global dan menyediakan pinjaman kepada negara anggotanya untuk membantu masalah-masalah keseimbangan neraca keuangan masing-masing negara. Salah satu misinya adalah membantu negara-negara yang mengalami kesulitan ekonomi yang serius, dan sebagai imbalannya, negara tersebut diwajibkan melakukan kebijakan-kebijakan tertentu, misalnya privatisasi badan usaha milik negara. Kantor pusatnya terletak di Washington, DC, Amerika Serikat.

Ada resep generik yang diberikan IMF pada semua pasiennya yaitu program penyesuaian struktural atau *Structural Adjustment Program (SAP)* dan kebijakan deregulasi.

---

<sup>33</sup> IMF (*International Monetary Fund*), (diunduh pada 14 Mei 2010); dari [http://id.wikipedia.org/wiki/Dana\\_Moneter\\_Internasional](http://id.wikipedia.org/wiki/Dana_Moneter_Internasional)

**a. Kebijakan penyesuaian struktural**

Kebijakan ini mengharuskan negara untuk meliberalisasi impor dan pelaksanaan aliran sumber-sumber keuangan secara bebas, devaluasi, pelaksanaan kebijakan moneter dan fiskal di dalam negeri yang terdiri dari pembatasan kredit, pengenaan tingkat bunga yang relatif tinggi, penghapusan subsidi, peningkatan tarif pajak, peningkatan barang pokok masyarakat dan menekan tuntutan kenaikan upah buruh sedangkan yang terakhir pemasukan investasi asing yang lebih lancar.

**b. Kebijakan Deregulasi**

Kebijakan ini mencakup empat komponen:

- 1) Intervensi pemerintah harus dihilangkan atau diminimalisir untuk menghindari distorsi pasar.
- 2) Privatisasi seluas-luasnya dalam bidang ekonomi hingga mencakup bidang-bidang yang selama ini dikuasai oleh negara.
- 3) Liberalisasi seluruh kegiatan ekonomi dan semua proteksi harus dihilangkan.
- 4) Memperbesar dan melancarkan arus masuk investasi asing dengan fasilitas-fasilitas yang lebih luas dan lebih longgar atau dengan kata lain penguasaan asing terhadap terhadap unit ekonomi baik swasta maupun negara harus diperkenankan.

Pada mei 1998, karena kesepakatan antara IMF dan Soeharto, pemerintah

Kebijakan ini jugalah yang menyulut penolakan keras dari rakyat dan mengakibatkan tumbanganya Rezim Soeharto jatuh.<sup>34</sup>

## **B. Dampak Kegagalan Bank Dunia Dan IMF Dalam Mengatasi Krisis Ekonomi Indonesia**

Berbicara soal utang negeri ini, yang segera teringat oleh pikiran kita adalah lembaga rentenir internasional seperti International Monetary Fund (IMF), Bank Dunia, ataupun Asian Development Bank (ADB). Persoalan utang luar negeri ini pun akan segera membawa ingatan kita pada deretan angka berjumlah sekitar US\$ 150 miliar, yang merupakan total utang luar negeri Indonesia, baik swasta dan publik.

Kisah keterlibatan lembaga-lembaga keuangan internasional tersebut (IMF Bank Dunia, ADB) sangat erat hubungannya dengan carut-marutnya perekonomian negeri ini serta perekonomian negara-negara pengutang lainnya di Asia dan Amerika Latin.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> *Mengulas jejak IMF di Indonesia, Intervensi tanpa henti*, (diunduh pada 6 Mei 2010); dari <http://harmono.multiply.com/journal/item/12>

<sup>35</sup> *Sejarah Hitam IMF*, (diunduh pada 6 Mei 2010); dari [sejarah%20hitam%20imf%20c2%ab%20jundullah%201924.htm](http://sejarah%20hitam%20imf%20c2%ab%20jundullah%201924.htm)

## 1. Dampak Kegagalan Bank Dunia bagi Indonesia:<sup>36</sup>

Tujuan awal dari dibentuknya Bank Dunia adalah untuk mengatur keuangan dunia pasca PD II dan membantu negara-negara korban perang untuk membangun kembali perekonomiannya. Sejak tahun 1960-an, pemberian pinjaman difokuskan kepada negara-negara non-Eropa untuk membiayai proyek-proyek yang bisa menghasilkan uang, supaya negara yang bersangkutan bisa membayar kembali hutangnya, misalnya proyek pembangunan pelabuhan, jalan tol, atau pembangkit listrik. Era 1968-1980, pinjaman Bank Dunia banyak dikucurkan kepada negara-negara Dunia Ketiga, dengan tujuan ideal untuk mengentaskan kemiskinan di negara-negara tersebut. Pada era itu, pinjaman negara-negara Dunia Ketiga kepada Bank Dunia meningkat 20% setiap tahunnya.

Sejak tahun 1970-an Bank Dunia mengubah konsentrasinya karena situasi semakin meningkatnya jurang perekonomian antara negara berkembang dan negara maju. Pada era itu, seiring dengan merdekanya negara-negara yang semula terjajah, jumlah negara berkembang semakin meningkat. Negara-negara berkembang menuntut distribusi kemakmuran (*distribution of welfare*) yang lebih merata dan negara-negara maju memenuhi tuntutan ini dengan cara menyuplai dana pembangunan di negara-negara berkembang.

Meskipun tugas Bank Dunia adalah mengatur kestabilan moneter, namun dalam prakteknya, Bank Dunia sangat mempengaruhi politik global karena

---

<sup>36</sup> Peran Bank Dunia terhadap kemunduran perekonomian Indonesia, (diunduh pada 6 Mei 2010);

hampir semua negara di dunia menjadi penerima hutang dari Bank Dunia. Sejak awal beroperasinya, Bank Dunia sudah mempengaruhi politik dalam negeri negara yang menjadi penghutangnya.

Besarnya jumlah hutang (yang terus bertambah) membuat pemerintah juga harus terus mengalokasikan dana APBN untuk membayar hutang dan bunganya. Sebagai ilustrasi, dapat kita lihat data APBN 2004 dimana pemerintah mengalokasikan Rp 114.8 trilyun (28% dari total anggaran) untuk belanja daerah, Rp 113.3 trilyun untuk pembayaran utang dalam dan luar negeri (27% dari total anggaran), dan subsidi hanya Rp 23.3 trilyun (5% dari total anggaran). Dari ketiga komponen anggaran belanja tersebut, anggaran belanja daerah dan subsidi masing-masing mengalami penurunan sebesar Rp 2 trilyun dan Rp 2.1 trilyun. Sedangkan alokasi untuk pembayaran utang mengalami kenaikan sebesar Rp 14.1 trilyun. Komposisi dalam anggaran belanja negara tersebut mencerminkan besarnya beban utang tidak saja menguras sumber-sumber pendapatan negara, tetapi juga mengorbankan kepentingan rakyat berupa pemotongan subsidi dan belanja daerah. Karena itu, meski Bank Dunia memiliki semboyan "*working for a world free of poverty*", namun meski telah lebih dari 60 tahun beroperasi di Indonesia, angka kemiskinan masih tetap tinggi. Data dari Badan Pusat Statistik tahun 2009, ada 31,5 juta penduduk miskin di Indonesia.

Anggoro (2008), peneliti dari Institute of Global Justice, menulis, kerugian yang diderita Indonesia karena menerima pinjaman dari Bank Dunia adalah sebagai berikut:

**a. Indonesia Mengalami Kerugian dalam bidang ekonomi.**

Indonesia kehilangan hasil dari pengilangan minyak dan penambangan mineral (karena diberikan untuk membayar hutang dan karena proses pengilangan dan penambangan itu dilakukan oleh perusahaan-perusahaan transnational partner Bank Dunia). Jebakan hutang yang semakin membesar, karena mayoritas hutang diberikan dengan konsesi pembebasan pajak bagi perusahaan-perusahaan AS dan negara donor lainnya. Hutang yang diberikan akhirnya kembali dinikmati negara donor karena Indonesia harus membayar "biaya konsultasi" kepada para pakar asing, yang sebenarnya bisa dilakukan oleh para ahli Indonesia sendiri. Hutang juga dipakai untuk membiayai penelitian-penelitian yang tidak bermanfaat bagi Indonesia melalui kerjasama-kerjasama dengan lembaga penelitian dan universitas-universitas. Bahkan, sebagian hutang dipakai untuk membangun infrastruktur demi kepentingan perusahaan-perusahaan asing, seperti membangun fasilitas pengeboran di ladang minyak Caltex atau Exxon Mobil. Pembangunan infrastruktur itu dilakukan bukan di bawah kontrol pemerintah Indonesia, tetapi langsung dilakukan oleh Caltex dan Exxon.

**b. Indonesia Mengalami Kerugian dalam bidang politik.**

Keterikatan pada hutang membuat pemerintah menjadi sangat bergantung kepada Bank Dunia dan mempengaruhi keputusan-keputusan politik yang dibuat pemerintah. Pemerintah harus berkali-

kali membuat reformasi hukum yang sesuai dengan kepentingan Bank Dunia.

Hal ini juga diungkapkan ekonom Rizal Ramli (2009), "Lembaga-lembaga keuangan internasional, seperti Bank Dunia, IMF, ADB, dan sebagainya dalam memberikan pinjaman, biasanya memesan dan menuntut UU ataupun peraturan pemerintah negara yang menerima pinjaman, tidak hanya dalam bidang ekonomi, tetapi juga di bidang sosial. Misalnya, pinjaman sebesar 300 juta dolar AS dari ADB yang ditukar dengan UU Privatisasi BUMN, sejalan dengan kebijakan Neoliberal. UU Migas ditukar dengan pinjaman 400 juta dolar AS dari Bank Dunia.

## **2. Dampak Kegagalan IMF bagi Indonesia:**

Krisis ekonomi yang berawal dari jatuhnya nilai tukar bath berimbas juga pada perekonomian Indonesia. Wabah krisis ekonomi 1997 yang berawal di Thailand itu akhirnya mendorong dipercayanya IMF sebagai 'dewa penolong' yang dapat menciptakan stabilitas finansial. Suntikan dana terus dilakukan untuk menyehatkan negara-negara Asia, terutama Thailand, Korea selatan, dan tak ketinggalan Indonesia. Stabilitas finansial yang didambakan ternyata tidak kunjung tiba, yang terjadi justru keadaan ekonomi Indonesia yang semakin terpuruk. Dampak kegagalan IMF dalam mengatasi krisis ekonomi di Indonesia adalah:

**a. Semakin banyaknya pengangguran dan kemiskinan.**

Di Indonesia, potret kegagalan IMF dari segi menciptakan kesempatan kerja baru, misalnya, tampak nyata. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cuma 3.66% pada tahun 2002 itu hanya mampu menciptakan kesempatan kerja baru dan menyerap sekitar 1,7 juta dari angkatan kerja baru yang masuk pasar sekitar 2,5 juta orang. Ini berarti, setiap tahun masih ada tambahan pengangguran baru sekitar 800,000 orang. Keadaan ini menjadi serius dengan pengangguran terbuka sekitar 9 juta dan yang setengah menganggur mencapai 39 juta orang.<sup>37</sup> Selain itu, jumlah penduduk miskin juga semakin bertambah dari tahun ke tahun. Pada tahun 1996 (sebelum krisis) jumlah penduduk miskin ada 34,96 juta orang, tahun 1999 berjumlah 47,97 juta orang, tahun 2005 berjumlah 35,10 juta orang, dan tahun 2006 berjumlah 39,30 juta orang. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin justru semakin meningkat setelah Indonesia meminta bantuan lembaga moneter dunia tersebut.

Dampak krisis moneter di Indonesia terus saja menimbulkan dampak yang luar biasa di berbagai sektor. Sehingga sampailah Indonesia pada krisis multidimensi artinya sudah hampir seluruh sendi kehidupan berbangsa tertimpa krisis. Mulai dari krisis ekonomi krisis moral krisis kepemimpinan krisis pendidikan krisis keamanan krisis stabilitas krisis identitas dan masih banyak lagi.

**b. Penurunan Angka Partisipasi Sekolah**

Krisis ekonomi tidak hanya memporak-porandakan kehidupan ekonomi bangsa Indonesia, tetapi juga mengancam para penerus generasi bangsa ini

---

<sup>37</sup> *Sejarah Hitam IMF*, (di unduh pada 6 Mei 2010); dari [sejarah%20hitam%20imf%20%20ab%20jundullah%201924.htm](http://sejarah%20hitam%20imf%20%20ab%20jundullah%201924.htm)

sendiri. Hal ini dikarenakan uang masih menjadi tolak ukur utama dalam pendidikan. Semakin tinggi jenjang pendidikan yang akan ditempuh, maka akan semakin mahal pula biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat. Program wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan pemerintah pada 1994 sepertinya belum benar-benar berhasil dijalankan.<sup>38</sup> Lagi-lagi penyebab utamanya adalah tentu saja uang. Hal inilah yang penulis maksud dengan keadaan yang mengancam generasi penerus bangsa.

Meskipun angka partisipasi sekolah terus meningkat, namun masih terdapat sejumlah siswa yang tidak mampu melanjutkan pendidikannya atau putus sekolah. Susenas 2008 memperkirakan bahwa angka putus sekolah di tingkat pendidikan menengah dan atas masih relatif tinggi, yaitu masing-masing sekitar 3 persen dan 8 persen, di mana kelompok siswa laki-laki memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk meninggalkan sekolah dibandingkan siswa perempuan.

Angka Putus Sekolah mencerminkan anak-anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu, hal ini sering digunakan sebagai salah satu indikator berhasil/tidaknya pembangunan di bidang pendidikan. Penyebab utama putus sekolah antara lain karena kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan anak sebagai investasi masa depannya; kondisi ekonomi orang tua yang miskin; dan keadaan geografis yang kurang menguntungkan.

---

<sup>38</sup> Djoko Hartono and David Ehrman, *The Indonesian Crisis – A Human Development Perspective* (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2002), p. 183.

**Tabel 1**

**Angka Putus Sekolah menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal, Tahun 2006-2008<sup>39</sup>**

Kelompok Umur dan Jenis Kelamin	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan + Perdesaan		
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
(1)									
7-12	0.83	0.56	0.42	1.29	0.97	0.41	1.10	0.80	0.42
L	0.67	0.40	0.38	0.78	0.69	0.49	0.74	0.58	0.44
P	0.75	0.48	0.40	1.05	0.84	0.45	0.93	0.69	0.43
L + P									
13-15									
L	3.36	2.63	3.12	5.66	5.64	3.35	4.75	4.41	3.25
P	2.39	2.06	3.14	3.98	3.78	3.14	3.37	3.07	3.14
L + P	2.88	2.35	3.13	4.86	4.74	3.25	4.09	3.76	3.19
16-18									
L	6.44	3.03	6.28	11.33	7.29	12.29	9.32	5.44	9.38
P	4.38	1.68	5.36	7.04	5.36	9.26	6.61	3.65	7.44
L + P	5.41	2.36	5.82	9.42	6.39	11.05	8.02	4.58	8.44

**c. Penurunan Tingkat Kesadaran Masyarakat Terhadap Kesehatan<sup>40</sup>**

Krisis ekonomi yang sudah mulai nampak pada tahun 1997 semakin membuat rakyat miskin bertambah menderita manakala krisis ini tidak hanya berdampak pada kemiskinan dan tingkat kesejahteraan saja, akan tetapi krisis ekonomi yang sudah berlangsung lama itu juga

<sup>39</sup> BPS, *Indikator Kesra 2007 & 2008*

<sup>40</sup> *Pengaruh Krisis Terhadap Pelayanan Kesehatan Masyarakat*, (diunduh pada 3 Mei 2010); dari <http://library.usu.ac.id/download/fkm/fkm-juanita6.pdf>

berdampak pada dunia kesehatan rakyat Indonesia. Logika sederhana yang bisa digambarkan dari keadaan ini adalah, jika memenuhi kebutuhan sehari-hari saja sulit bagaimana dengan pemenuhan kesehatan. Mahalnya biaya pengobatan membuat rakyat yang belum sadar akan pentingnya kesehatan semakin memperparah keadaan dunia kesehatan rakyat Indonesia. Karena masyarakat miskin cenderung lebih memikirkan bagaimana untuk bisa memenuhi kebutuhannya daripada mempermasalahkan kesehatannya.

### **C. Sebab-Sebab Kegagalan Bank Dunia dan IMF:**

Kenapa kaum kapitalis yang dalam hal ini Bank Dunia dan IMF gagal dalam menyelesaikan masalah krisis di Indonesia? Hal ini tidak terlepas dari sudut pandang kaum kapitalis dalam melihat letak persolan ekonomi di Indonesia. Kaum kapitalis berasumsi bahwa persoalan ekonomi terletak pada masalah produksi. Artinya, masalah ekonomi terletak pada tidak terbatasnya keinginan manusia, sementara sumberdaya yang diperlukan untuk memenuhi keinginan tersebut sangat terbatas. Sehingga harus ada peningkatan produksi dalam mengatasi hal tersebut. Karenanya, pada hitungan angka rata-rata statistik seperti GDP (*Gross Domestic Product*) dan GNP (*Gross National Product*) merupakan hal yang sangat penting, tanpa harus melihat kesejahteraan orang per orang. Sehingga yang dilakukan oleh Bank Dunia dan IMF dalam memberi solusi atas krisis yang dihadapi oleh Indonesia adalah memberikan suntukan dana.

Faktor kegagalan IMF di Indonesia sejak keterlibatannya pada Oktober 1997-2002 dapat digambarkan sebagai berikut:

*Pertama*, IMF selalu memaksakan pengetatan fiskal dan moneter jika suatu negara mengalami krisis ekonomi. Pengetatan fiskal tersebut dipaksakan kepada negara berkembang agar ada surplus untuk membayar beban peningkatan utang. Padahal, masing-masing negara memiliki struktur ekonomi dan kompleksitas masalah yang berbeda. Akibatnya, kondisi ekonomi yang sudah memburuk malah semakin terpuruk akibat kebijakan pengetatan fiskal dan moneter yang dianjurkan IMF, terutama pada awal krisis.

*Kedua*, pendekatan dengan penambahan beban utang untuk mendukung posisi neraca pembayaran hanyalah perbaikan yg bersifat semu, tidak real, karena bukan hasil peningkatan aliran modal swasta maupun peningkatan ekspor *netto*. Karena terus-menerus melakukan pinjaman untuk meningkatkan neraca pembayaran, beban utang meningkat berlipat menjadi Rp 650 triliun (US\$ 72 miliar).

*Ketiga*, prasyarat dan rekomendasi kebijakan IMF dalam berbagai *Letter of Intent* lebih banyak mencakup bidang di luar makroekonomi dan moneter seperti perbankan, pertanian, *corporate restructuring*, dan industri. Rekomendasi IMF untuk menutup 16 bank pada November 1997 telah menciptakan destabilisasi finansial dan punahnya kepercayaan masyarakat. Akibatnya, ekonomi Indonesia mengalami *hard landing*, kebangkrutan massal, dan jutaan orang di PHK.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> *Sejarah Hitam IMF*, (di unduh pada 6 Mei 2010); dari <http://www.kemlu.go.id/pressroom/pressrelease/20100506.htm>

#### D. Wacana Perubahan Sistem Ekonomi

Sudah lama para pakar ekonomi mengatakan bahwa umat Islam harus kembali pada konsep ekonomi yang berdasar pada prinsip syariah, karena hanya itu satu-satunya jalan yang bisa ditempuh agar umat Islam tidak selalu terpuruk dan terbelakang di bidang ekonominya. Hal ini juga berlaku bagi Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

Pendapat ekonom tentang Ekonomi Islam adalah:

1. Dr. Muhammad Hatta, *founding father* republik ini mengingatkan di awal kemerdekaan negeri ini bahwa : “djiwa Islam berontak terhadap Kapitalisme jang menghisap dan menindas jang menurunkan deradjat manusia, jang membawa sistim jang lebih jahat dari pada perbudakan, dari pada feodalisme”.<sup>42</sup>
2. Agustianto, Sekjen DPP Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), mengatakan bahwa: “Pemerintah diharapkan lebih akomodatif terhadap ekonomi syariah, karena ekonomi syariah memiliki konsep yang unggul dalam mewujudkan kesejahteraan, stabilitas ekonomi, dan inflasi. Selama ini sudah memang ada perbankan dan LKS, namun dalam skala yang lebih luas dan makro, pemerintah belum menjadikan ekonomi syariah sebagai sistem ekonomi andalan. Jika Indonesia masih berkiblat ke Barat yang memiliki sistem ekonomi yang rapuh, maka yakinlah Indonesia pasti akan terancam krisis terus-menerus sepanjang sejarah”.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> *Semiloka Ekonomi Islam sebagai Sistem Pendidikan Ilmu Ekonomi di Indonesia*, (diunduh pada 11 Juli 2010); pada <http://i-epistemology.net/news-a-events/news/329-semiloka-ekonomi-islam-sebagai-sistem-pendidikan-ilmu-ekonomi-di-indonesia.html>

<sup>43</sup> *Ekonomi Islam: Bubble Economy dan Fenomena Ribawai (Telaah terhadap akar krisis)*, (diunduh pada 11 Juli 2010); dari <http://ekisopini.blogspot.com/2010/01/bubble-economy-dan-fenomena-ribawai.html>

3. Muhammad Syafii Antonio, perintis Bank Syariah di Indonesia, berpendapat bahwa: “Sudah saatnya kita kembali pada sistem ekonomi Syariah, karena sudah terbukti ekonomi kapitalislah yang jelas-jelas sudah merusak sendi-sendi perekonomian negeri ini”.<sup>44</sup>
4. Prof. Dr. Suroso Imam Jazuli (ekonom Islam) dalam bukunya berjudul *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, mengatakan bahwa: “Sejak zaman Merkantilisme hingga dewasa ini paling tidak terdapat sepuluh sistem ekonomi besar di dunia yang telah gagal untuk mencari jalan keluar atau memecahkan permasalahan pokok dalam ilmu ekonomi, antara lain : a) Merkantilis, b) Klasik dan NeoKlasik, c) Kapitalis, d) Sosialis, e) Komunis, f) Sistem Ekonomi Berencana di Dunia Ketiga, g) Monetary Orde, h) Orde Strukturalis, i) Sistem Ekonomi Campuran, dan j) Post Industrial State Economy. Sistem ekonomi dunia ini sebagian besar cenderung ke arah sekularisasi.”<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> *Energi Ekonomi Syariah*, (diunduh pada 12 Juli 2010); dari [http://www.koperasi165.com/id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=64&Itemid=78](http://www.koperasi165.com/id/index.php?option=com_content&task=view&id=64&Itemid=78)

<sup>45</sup> *Semiloka Ekonomi Islam sebagai Sistem Pendidikan Ilmu Ekonomi di Indonesia*, (diunduh pada 11 Juli 2010); pada <http://i-epistemology.net/news-a-events/news/329-semiloka-ekonomi-islam-sebagai-sistem-pendidikan-ilmu-ekonomi-di-indonesia.html>